

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan suatu wilayah selalu diatur untuk peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat sehingga harus dipertimbangkan dalam proses pembangunan selain aspek pertumbuhan dan pemerataan yaitu dampak kegiatan ekonomi terhadap pola hidup sosial masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Kuncoro, 1997:37). Kesejahteraan dalam suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh suatu pembangunan terjadi di sebuah negara secara tidak langsung, apakah negara tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. Apabila dalam sisi ekonomi sebuah negara mengalami kemajuan, maka masyarakat akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Hal ini tentu akan berbeda ketika sebuah negara mengalami kemunduran, masyarakat tidak sanggup dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau dapat dikatakan masyarakat mengalami kemiskinan karena mereka hidup dalam keadaan tidak cukup. Haughton (2012) menyatakan apabila masyarakat kurang sejahtera sama dengan kemiskinan.

Kemiskinan menjadi fokus utama dari pemerintah di berbagai negara. Tinggi rendah tingkat kemiskinan dapat menjadi indikator utama dalam melihat seberapa berhasil pembangunan dilakukan oleh suatu negara, karena kesejahteraan masyarakat baik secara lahir batin akan meningkat seiring dengan semakin menurun tingkat kemiskinan (Bintang & Woyanti, 2018).

Di Indonesia, kemiskinan dibuktikan dengan masih banyak temuan penduduk miskin mayoritas tinggal di pedesaan sehingga sulit terjangkau

perhatian pemerintah. Kemiskinan terdiri dari beberapa aspek, termasuk aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dikaitkan dengan tingkatan sosial dengan definisi stratifikasi atau diferensiasi sosial antara si kaya dan si miskin, sedangkan dalam aspek ekonomi dikaitkan dengan level ekonomi meliputi pendapatan tiap individu dan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistika (2010) menyatakan terdapat banyak penyebab kemiskinan yakni kemiskinan struktural, kemiskinan natural, dan kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural sendiri memiliki arti kemiskinan disebabkan oleh strata membuat beberapa golongan masyarakat tertentu mendominasi sarana berkaitan dengan segala aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Sedangkan kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang muncul karena nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kemiskinan ini bertahan bukan hanya karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga karena budaya yang menghambat perubahan, seperti sikap pasrah terhadap keadaan (*fatalisme*), rendahnya minat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, serta kecenderungan untuk mempertahankan pola hidup yang tidak produktif. Dalam konteks ini, kemiskinan terjadi karena masyarakat telah terbiasa hidup dalam kondisi kekurangan sehingga tidak memiliki dorongan kuat untuk meningkatkan kapasitas diri maupun kualitas hidup. Oscar Lewis (1966) menyebut kondisi ini sebagai *culture of poverty*, yaitu suatu pola budaya yang diwariskan antar-generasi dan membuat kemiskinan berulang dari waktu ke waktu.

Dalam kemiskinan kultural, individu atau kelompok seringkali terperangkap dalam kebiasaan yang tidak mendukung perbaikan kesejahteraan,

seperti pengelolaan keuangan yang kurang bijak, rendahnya partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan keterampilan, serta minimnya keberanian mengambil peluang ekonomi baru. Pola pikir seperti menerima nasib serta anggapan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang wajar juga memperkuat keberlangsungan kemiskinan jenis ini. Akibatnya, meskipun terdapat peluang ekonomi atau bantuan pemerintah, perubahan tidak selalu terjadi karena hambatan utama terletak pada pola budaya, bukan semata keterbatasan materi.

Salah satu wilayah menjadi perhatian adalah Kawasan Kedu Raya, terdiri dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, seperti Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen. Kedu Raya merupakan kawasan “lumbung pangan nasional” terbesar di Jawa Tengah. Namun, kemiskinan kultural di kawasan Kedu Raya tercermin dari pola nilai dan kebiasaan masyarakat agraris yang masih kuat, terutama di wilayah pedesaan seperti Wonosobo, Temanggung, Purworejo, dan Kebumen. Masyarakat cenderung memiliki orientasi jangka pendek karena pendapatan bergantung pada hasil pertanian musiman. Selain itu, adopsi teknologi modern dan pilihan pekerjaan non-pertanian masih rendah karena nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya, seperti sikap nrimo dan keengganan mengambil risiko. Kondisi ini membuat kemiskinan di Kedu Raya tidak hanya disebabkan oleh faktor struktural dan ekonomi, tetapi juga oleh pola budaya yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari.

Kawasan Kedu Raya dikenal sebagai salah satu wilayah agraris yang kaya di Jawa Tengah karena didukung oleh komoditas unggulan seperti kopi

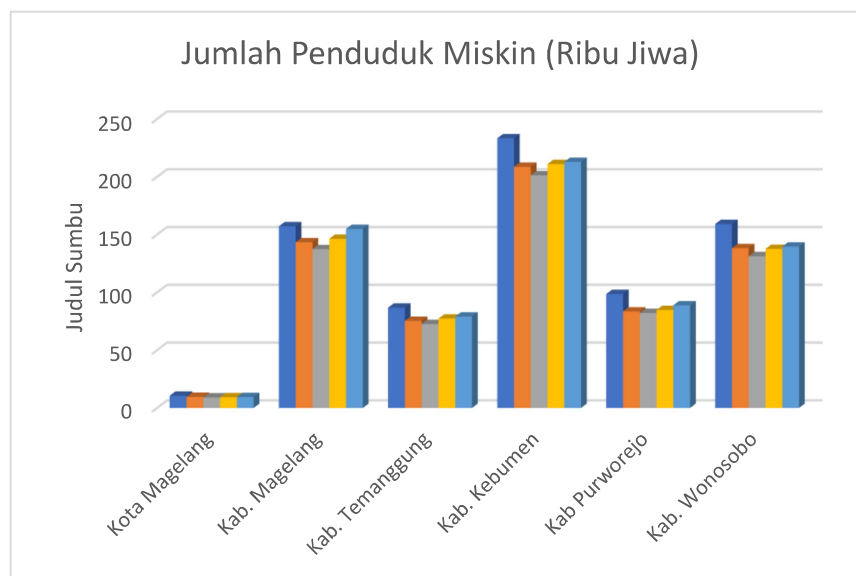
dan tembakau yang memiliki kualitas terbaik di tingkat regional. Keunggulan hasil pertanian tersebut menjadikan wilayah ini memperoleh pendapatan yang tinggi, terutama saat musim panen raya tiba. Pada masa ini, peningkatan pendapatan masyarakat sangat signifikan sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan primer dan sekunder, tetapi juga kebutuhan tersier seperti barang-barang konsumtif dan gaya hidup mewah. Fenomena ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan daya beli yang bersifat musiman dan temporer. Namun demikian, ketika terjadi kegagalan panen akibat faktor cuaca, serangan hama, atau fluktuasi harga pasar, pola konsumsi masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Gaya hidup konsumtif tetap dipertahankan dengan mengandalkan akses terhadap fasilitas kredit, baik dari lembaga keuangan formal maupun informal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap utang konsumtif yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas atau tabungan jangka panjang, sehingga masyarakat terjebak dalam siklus ekonomi stagnan. Akibatnya, meskipun kawasan ini secara alamiah kaya akan potensi sumber daya pertanian, taraf hidup masyarakatnya cenderung tidak mengalami perbaikan yang berkelanjutan (Susilo, 2020; Pramono & Hidayat, 2021). Struktur ekonomi di kawasan Kedu Raya yang masih didominasi sektor pertanian membuat masyarakat lebih rentan mempertahankan budaya tradisional yang cenderung sulit bergeser menuju pola ekonomi modern. Ketergantungan pada sektor agraris sering kali menciptakan pola hidup yang bersifat subsisten, di mana masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa memiliki dorongan besar untuk mengembangkan produktivitas

atau inovasi baru. Kondisi seperti ini sejalan dengan pandangan Lewis (1966) yang menjelaskan bahwa lingkungan ekonomi tradisional berpotensi mereproduksi budaya kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ekonomi yang stagnan menyebabkan kemiskinan masih menjadi isu krusial di Kawasan Kedu Raya. Jumlah penduduk miskin di Kedu Raya per tahun 2023 mencapai sekitar 690.000 jiwa atau sekitar 12% dari total populasi kawasan tersebut. Kabupaten Kebumen dan Wonosobo termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, masing-masing mencatatkan angka kemiskinan sebesar 15,04% dan 14,23% (BPS Jawa Tengah, 2023). Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Jawa Tengah berada di angka 10,77%. Jumlah penduduk miskin tinggi dapat disebabkan oleh pembangunan manusia belum optimal.

Grafik 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Kawasan Kedu Raya Periode Tahun 2017-2021 (Ribuan Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin tertera pada tabel 1.1 dalam periode tahun 2017-2021, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kebumen mempunyai jumlah penduduk miskin paling banyak di Daerah Kedu Raya. Kondisi kemiskinan di wilayah Kedu Raya masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kabupaten Wonosobo mencatat persentase penduduk miskin tertinggi pada Maret 2024, yakni sekitar 15,28%, dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian dataran tinggi dan pariwisata yang belum optimal. Kabupaten Kebumen juga memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi karena perekonomiannya didominasi sektor pertanian tradisional dan perikanan yang produktivitasnya terbatas. Kabupaten Magelang mencatat angka sekitar 10,83% dengan perekonomian yang relatif lebih beragam, ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, serta pariwisata seperti Borobudur. Kabupaten Temanggung dengan tingkat kemiskinan 8,67% didukung oleh sektor perkebunan tembakau, hortikultura, dan industri kecil, sehingga trennya cenderung menurun. Kabupaten Purworejo menghadapi kemiskinan di wilayah pedesaan yang bergantung pada pertanian, meskipun ekonomi mulai berkembang melalui perdagangan dan jasa. Sementara itu, Kota Magelang memiliki tingkat kemiskinan terendah di Kedu Raya, yaitu 5,94%, dengan perekonomian yang ditopang sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan, serta akses infrastruktur yang lebih baik. Secara keseluruhan, variasi kemiskinan di Kedu Raya erat kaitannya dengan struktur ekonomi lokal, ketergantungan pada sektor pertanian, serta perbedaan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Ketimpangan geografis di beberapa kecamatan di Kedu Raya memperkuat munculnya kemiskinan kultural. Akses masyarakat

terhadap pendidikan berkualitas, pasar, dan pekerjaan formal masih terbatas di wilayah tertentu, terutama yang letaknya lebih jauh dari pusat kota. Ketidakmerataan akses ini mengurangi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan atau beralih ke pekerjaan yang lebih produktif. Menurut Chambers (1983), keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi merupakan faktor penting yang membuat masyarakat terjebak dalam pola kemiskinan yang terus berulang.

Mobilitas sosial yang rendah juga menjadi faktor pendorong bertahannya kemiskinan kultural di kawasan ini. Ketika peluang kerja di luar sektor pertanian terbatas, masyarakat cenderung mempertahankan pola hidup yang sama dari generasi ke generasi, sehingga perubahan sosial-ekonomi berlangsung sangat lambat. Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa rendahnya mobilitas sosial akan memperkuat mekanisme reproduksi kemiskinan antar-generasi karena masyarakat tidak mampu keluar dari kondisi struktural maupun kultural yang mengikat mereka.

Angka kemiskinan dikatakan tinggi ini tercermin dari keadaan ekonomi di kawasan Kedu Raya dapat dijelaskan melalui beberapa indikator, yakni sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan antara potensi produksi dengan akses pasar, yang mengindikasikan rendahnya nilai tambah dari sektor pertanian.
2. Budaya konsumtif membuat masyarakat terbiasa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier melalui pembiayaan kredit, tanpa memperhatikan kemampuan pelunasan.

3. Sebagian besar penduduk yang tersisa merupakan kelompok usia tua, sedangkan generasi usia produktif cenderung memilih merantau ke luar daerah untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Indikator-indikator tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan upah minimum juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Upah minimum adalah gaji bulanan terdiri dari gaji pokok (termasuk tunjangan tetap). Kebijakan upah minimum merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan pemerintah dicapai dengan menghitung kebutuhan dasar (seperti pangan, sandang dan papan) dan jaring pengaman sosial (dengan menghitung kebutuhan jasa pendidikan dan transportasi dasar).

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berperan sebagai jaring pengaman ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja, terutama di sektor formal. Di wilayah Kedu Raya— meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, dan Purworejo—UMK mengalami kenaikan secara bertahap selama periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (2024), UMK Kota Magelang terus meningkat dari Rp1.853.000 (2020) menjadi Rp2.236.776 (2024), menjadikan UMK tertinggi di kawasan ini. Sementara itu, Kabupaten Wonosobo dan Kebumen mencatat UMK terendah pada 2024, masing-masing sebesar Rp2.121.106 dan Rp2.116.620. Kenaikan UMK tersebut ideal dapat menekan angka kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Namun, efektivitas sangat tergantung pada struktur ketenagakerjaan lokal. Jika mayoritas penduduk bekerja di sektor informal atau

pertanian, maka dampak UMK terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas (Siregar & Wahyuni, 2021).

Data kemiskinan dari BPS Jawa Tengah (2024) menunjukkan bahwa daerah dengan UMK rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Sebagai contoh, Kabupaten Kebumen memiliki UMK relatif rendah dan mencatat tingkat kemiskinan sebesar 15,04% pada 2023— tertinggi di antara wilayah Kedu Raya. Sebaliknya, Kota Magelang memiliki UMK tertinggi hanya mencatat kemiskinan sebesar 7,44%. Argumentasi diperkuat bahwa peningkatan UMK dapat membantu penekanan angka kemiskinan, terutama jika diiringi pembukaan lapangan kerja formal luas serta pengawasan ketat terhadap penerapan upah minimum. Namun demikian, disparitas pembangunan antarwilayah, rendah produktivitas tenaga kerja, dan lemah kepatuhan pengusaha terhadap regulasi upah juga menjadi faktor mempengaruhi keberhasilan kebijakan UMK dalam menurunkan angka kemiskinan (Putri & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, kebijakan UMK perlu disinergikan dengan strategi pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan sektor informal agar manfaat lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Upah minimum layak memberikan peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, seperti pemeriksaan rutin, pembelian obat-obatan, serta jaminan kesehatan, sehingga dapat memperbaiki indikator kesehatan. Indikator kesehatan dapat dilihat dari populasi Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu indikator. Status kesehatan penduduk digunakan untuk menilai keberhasilan program pemerintah. Badan Pusat Statistik mendefinisikan harapan hidup sebagai umur

rata-rata di mana orang-orang sukses akan tetap bertahan. Pada suatu tahun tertentu, mencapai usia x tahun dengan angka kematian umum di dalam komunitas. Harapan hidup adalah perkiraan umur dengan asumsi bahwa angka kematian rata-rata tidak berubah menurut usia.

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah, AHH secara provinsi terus mengalami peningkatan dari sekitar 72,19 tahun pada 2023. Di tingkat kabupaten, misal di Kabupaten Semarang (sebagai indikator daerah berhampiran), AHH meningkat dari 75,79 tahun (2021) ke 75,95 tahun (2023). Semakin besar AHH di suatu wilayah umum mencerminkan akses kesehatan lebih baik, sanitasi, serta pemenuhan gizi memadai—faktor-faktor berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Penelitian semisal Putri & Nugroho (2022) menunjukkan bahwa peningkatan AHH korelatif dengan penurunan prevalensi miskin, karena masyarakat lebih produktif dan memiliki ketahanan hidup lebih baik.

Di wilayah Kedu Raya, daerah dengan AHH relatif tinggi cenderung memperlihatkan tingkat kemiskinan lebih rendah. Misal, Kota Magelang memiliki AHH mendekati angka provinsi rata-rata, mencatat angka kemiskinan terendah di kawasan ini, yakni 7,44%, sedangkan Kabupaten Kebumen dan Wonosobo dengan kemungkinan AHH lebih rendah justru memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, berkisar 14–15%. Ini menunjukkan bahwa di mana akses kesehatan dan umur harapan hidup membaik, kualitas hidup meningkat dan masyarakat lebih mampu menghindari kemiskinan ekstrem. Namun, agar AHH

benar-benar memberi dampak pada pengentasan kemiskinan, perlu didukung juga oleh kebijakan kesehatan proaktif, peningkatan pelayanan medis, dan pemberdayaan ekonomi setempat.

Angka Harapan Hidup suatu wilayah dapat meningkat seiring dengan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah, karena pendidikan berperan penting dalam membentuk pola hidup sehat dan meningkatkan akses terhadap informasi serta layanan kesehatan. Rata-Rata Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang ditunjukkan dalam bentuk lama pendidikan (dalam tahun) diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber daya. Pendidikan berkualitas akan melatih talenta terdidik berkualitas dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Rasio ketergantungan (rasio ketergantungan disingkat DR) mengacu pada rasio (rasio) antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun ke atas 65) dan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi angka beban tanggungan maka semakin berat beban penduduk usia produktif, karena mereka harus mengeluarkan sebagian pendapatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia tidak produktif, begitu pula sebaliknya. Secara kasar, rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara, terlepas dari apakah negara tersebut tergolong negara maju (LDFE, UI).

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator penting dapat menunjukkan status ekonomi suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Rasio ketergantungan juga dapat menunjukkan perkembangan ekonomi suatu daerah. Ketika rasio ketergantungan tinggi, pertumbuhan ekonomi terganggu atau pendapatan masyarakat rendah, rasio ketergantungan rendah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi ketika rasio ketergantungan tinggi, karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk investasi dan tabungan, dan semua pendapatan digunakan untuk produksi baik bagi muda maupun tua dengan pekerjaan sesuai. Rasio ketergantungan tinggi dapat menghambat perkembangan negara berkembang, termasuk Indonesia, karena sebagian pendapatan kelompok produktif harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok belum berproduksi atau memproduksi. Ketika jumlah penduduk kecil, lebih mudah untuk memobilisasi dana dan anggaran pemerintah untuk investasi produktif. Dalam kasus Rasio ketergantungan rendah, makanan dan bahan mentah lain dapat disimpan dan penduduk berkualitas tinggi dapat hidup, sehingga meningkatkan harapan hidup daerah tersebut.

Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa perubahan perilaku dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting untuk memutus rantai kemiskinan yang bersifat kultural. Dengan demikian, analisis terhadap determinan kemiskinan kultural menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial, pendidikan, ekonomi rumah tangga, struktur pekerjaan, dan nilai budaya berkontribusi terhadap bertahannya kemiskinan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menguraikan secara komprehensif berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan kultural di Kawasan Kedu Raya. Fokus analisis tidak hanya melihat kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dinamika budaya lokal, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta struktur sosial yang membentuk pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat adalah “Analisis Determinan Kemiskinan Kultural di Kawasan Kedu Raya.”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Kemiskinan Kultural di Kawasan Kedu Raya?
2. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan Kultural di kawasan Kedu Raya?
3. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan Kultural di kawasan Kedu Raya?
4. Bagaimana pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan Kultural di kawasan Kedu Raya?

1.3.Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Kemiskinan Kultural di kawasan Kedu Raya

2. Untuk mengetahui pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan Kultural di kawasan Kedu Raya
3. Untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan Kultural di kawasan Kedu Raya
4. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan Kultural di kawasan Kedu Raya

1.4.Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode data panel. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2017-2021.

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan variabel Upah Minimum Kabupaten, Angka Harapan Hidup, Angka Lama Sekolah, dan Rasio Ketergantungan sebagai variabel independen (bebas) dan variabel Jumlah Penduduk Miskin sebagai variabel dependen (dependen) sebagai alat ukur untuk mengetahui atau mengukur seberapa berpengaruh variabel independen terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah khususnya kawasan Kedu Raya dengan menggunakan metode analisis data panel.

1.5.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

Sebagai acuan dan dapat memahami permasalahan kemiskinan secara benar, sehingga dapat mengatasi permasalahan perekonomian ada di Jawa Tengah.

2. Bagi masyarakat

Untuk menambah pengetahuan agar dapat memahami hubungan antara Jumlah Penduduk Miskin terhadap Upah Minimum Kabupaten, Angka Harapan Hidup, Angka Lama Sekolah, dan Rasio Ketergantungan

3. Bagi pengambilan kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam memahami faktor-faktor mempengaruhi kemiskinan di Indonesia sehingga dapat mengupayakan kebijakan tepat di Jawa Tengah

4. Bagi peneliti

Untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan selama duduk dibangku perkuliahan, agar dapat mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan untuk memenuhi syarat kelulusan kuliah di fakultas ekonomi dan bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Menambah potensi dan perbendaharaan perpustakaan dilingkungan kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur.